

Indonesia di Era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo: Kebijakan Luar Negeri di Tengah Dinamika Lingkungan Strategis Regional

Indonesia under Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) and Joko Widodo: Foreign Policy in the Middle of Regional Strategic Environment Dynamics

Aji Widiatmaja*, Ulul Albab**

*Program Studi Diplomasi Pertahanan, Fakultas Strategi Pertahanan,
Universitas Pertahanan Indonesia
email: *ajiwidiatmaja@gmail.com, **bolul87@gmail.com

Riwayat Artikel

Diterima 11 Maret 2019
Direvisi 20 April 2019
Disetujui 2 Mei 2019

Abstract

Indonesia's foreign policy in the Susilo Bambang Yudhoyono's (SBY) and Joko Widodo's era have their own strengths and weaknesses. SBY's foreign policy tended to be outward-looking, which was marked by promotion of soft power, high politics, and leveraging Indonesia influence in global stage. Meanwhile, Joko Widodo's foreign policy is more inward-looking in that it focuses more on domestic sectors. Problems will arise if a country carries out its foreign policy in an unbalanced manner. Development in the global and regional strategic environment requires a collective response achieved in multilateral forums. This makes cooperation and active participation of a country in international forums become important. This paper aims to analyze Indonesia's foreign policy under SBY and Joko Widodo to find out the strengths and weaknesses of both foreign policies. The author has also provided a foreign policy recommendation that combines both inward and outward-looking perspectives in its performance. They are made in the form of reclaiming Indonesia's leadership in ASEAN to make the region a zone of peace, freedom, and neutrality (ZOPFAN), preventing foreign powers infiltration, maintaining ASEAN countries sovereignty, and curbing pragmatic and unilateralist actions in response to strategic environmental dynamics. These are important to ensure the achievement of Indonesia's national interests. In simple terms, outward-looking policies are adopted as a tool to achieve national interests that benefit the Indonesian people (inward-looking).

Keywords: Foreign policy; inward looking; outward looking; Indonesia leadership; National interest.

Abstrak

Kebijakan luar negeri Indonesia di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kebijakan luar negeri SBY cenderung *outward looking* dengan mengedepankan *soft power* dan bercorak *high politics* serta mencoba meningkatkan pengaruh Indonesia di forum global. Sedangkan kebijakan luar negeri Joko Widodo lebih bersifat *inward looking* yang berfokus pada penguatan sektor domestik. Permasalahan akan muncul jika suatu negara tidak berimbang dalam menjalankan kebijakan luar negerinya. Perkembangan lingkungan strategis global dan regional membutuhkan respons kolektif yang dicapai dalam forum-forum multilateral. Hal ini membuat kerja sama dan keaktifan suatu negara dalam forum internasional menjadi penting. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan luar negeri Indonesia di era SBY dan Joko Widodo guna mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kemudian, penulis juga memberikan suatu rekomendasi kebijakan luar negeri yang menggabungkan corak *inward* dan *outward looking* dalam menjalankan kebijakan luar negeri. Hal tersebut berupa mengembalikan kepemimpinan Indonesia di ASEAN guna membuat ASEAN sebagai *zone of peace, freedom, and neutrality* (ZOPFAN), mencegah masuknya kekuatan asing, menajaga kedaulatan negara-negara ASEAN, serta mengurangi sikap pragmatis dan unilateralis dalam merespon perubahan lingkungan strategis. Hal tersebut penting dilakukan guna menjamin tercapainya kepentingan nasional Indonesia. Secara sederhana, kebijakan *outward looking* digunakan sebagai alat untuk mencapai kepentingan nasional yang memberi keuntungan pada rakyat Indonesia (*inward looking*).

Kata Kunci: kebijakan luar negeri; *inward looking*; *outward looking*; kepemimpinan Indonesia; kepentingan nasional.

Pendahuluan

Asia Tenggara merupakan wilayah yang paling dinamis jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di dunia. Wilayah ini mempunyai perbedaan satu dengan yang lain dalam hal ideologi, budaya, kondisi sosial, ekonomi, politik, dan kemampuan pertahanan. Sebagai daerah yang pernah terkoyak di masa perang dingin, Asia Tenggara berhasil mengelola konflik-konflik yang ada dengan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan terbentuknya *Association of Southeast Asia Nations* (ASEAN) di tahun 1967. Rosyidin mengatakan setidaknya terdapat tiga alasan yang mendorong terbentuknya ASEAN. Yang pertama, ASEAN dimaksudkan sebagai *political détente* antara Indonesia-Malaysia yang sempat terlibat “Politik Konfrontasi” di era demokrasi terpimpin Indonesia di bawah Soekarno. Konflik tersebut sempat membuat hubungan Indonesia-Malaysia menjadi memanas. Kedua, ASEAN berfungsi sebagai benteng pelindung dari persebaran ideologi komunis meskipun akhirnya Vietnam (sebagai negara komunis) bergabung dengan ASEAN pada tahun 1995. Yang ketiga, ASEAN ditujukan untuk menciptakan wilayah Asia Tenggara yang bebas dari intervensi kekuatan asing demi menjaga kedaulatan negara.¹ Telah banyak pakar menilai jika Indonesia memiliki peranan yang penting dalam terbentuknya ASEAN serta menjaganya tetap eksis hingga saat ini. Bahkan, Indonesia telah dijuluki sebagai *leader* dan *big brother* bagi negara-negara ASEAN.

Hal serupa turut disampaikan oleh Mantan Menteri Pertahanan Indonesia periode 2009-2014, Prof. Purnomo Yusgiantoro. Beliau menyampaikan jika Indonesia merupakan *big brother* dan negara berpengaruh di ASEAN. Namun hal tersebut bukan berarti Indonesia

memegang kontrol penuh di ASEAN, tetapi ASEAN tetap mengedepankan konsensus dan kesepakatan bersama antar-anggota dalam mengambil keputusan.² Dengan melihat fakta tersebut, kerjasama antar-anggota ASEAN mutlak diperlukan dalam rangka menjaga stabilitas dan keamanan kawasan. Meskipun telah berdiri lebih dari lima puluh tahun, ASEAN masih menghadapi ancaman keamanan yang diakibatkan oleh perkembangan lingkungan strategis. Beberapa masalah tersebut meliputi sengketa di Laut China Selatan (LCS), isu kemanusiaan Rohingya, *illegal fishing*, sengketa perbatasan, perompakan di laut, dan terorisme. Saat ini dunia sedang berada dalam tahapan multipolaritas dimana terdapat banyak pusat kekuatan yang sekaligus menambah beragamnya aktor-aktor dalam hubungan internasional. Salah satu aktor kuat dalam kancah internasional saat ini adalah kelompok teroris yang mencoba mengguncang struktur global dengan cara-cara yang berbahaya.³

Melihat perkembangan lingkungan strategis global maupun regional tersebut, hal yang paling mungkin dilakukan adalah menjalin kerja sama baik secara bilateral maupun multilateral. Hal ini karena tidak ada negara yang mampu untuk menghadapi ancaman tersebut sendirian. Untuk itu, menjalin hubungan baik dengan negara-negara tetangga merupakan langkah awal yang perlu dilakukan. Buzan dan Waever menyampaikan jika persebaran ancaman terhadap keamanan lebih dipengaruhi oleh lingkungan sekitar (*neighborhood*). Fenomena inilah yang mereka sebut sebagai *regional security complex* (RSC) sehingga menjalin hubungan kerja sama dengan negara tetangga adalah keniscayaan dan keharusan.⁴ Dalam menjalin

1 Muhammad Rosyidin, “The Indonesian Quarterly: Reflection on ASEAN at its 50th Anniversary,” *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS), Third Quarter, Vol. 45 No. 3 (2017): 225.

2 Prof. Purnomo Yusgiantoro, interview dilakukan oleh Aji Widiatmaja, 3 September, 2018.

3 Mangadar Situmorang, “Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Pemerintahan Jokowi-JK,” *Makalah Kegiatan Networking Kantor Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara* (2014): 72

4 Barry Buzan & Ole Waever, *Regions and Powers: The structure of International Security* (USA: Cambridge University Press, 2003), 4.

kerjasama internasional maka tidak lepas dari kebijakan luar negeri suatu negara. Maka, melihat kebijakan luar negeri suatu negara, dalam hal ini Indonesia, merupakan sesuatu yang penting untuk melihat kesesuaiannya dengan perkembangan lingkungan strategis saat ini. Bagi Indonesia, menjaga stabilitas dan keamanan kawasan menjadi salah satu alat untuk mencapai kepentingan nasional.

Sepuluh tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerapkan kebijakan luar negeri yang proaktif. Dengan menggunakan jargon seribu kawan dan nol musuh (*thousand friends zero enemy*), Indonesia pada pemerintahan SBY aktif dalam percaturan hubungan internasional (*outward looking*). SBY mengedepankan citra positif Indonesia dengan keaktifannya pada forum-forum internasional.⁵ Di sisi lain, Joko Widodo lebih fokus pada kebijakan dalam negeri (*inward looking*) terutama penguatan dalam bidang ekonomi dan infrastruktur.⁶ Kedua model kebijakan tersebut memiliki kelebihan masing-masing. Namun tentu saja, kedua model kebijakan tersebut juga memiliki kekurangan. Penulis berpendapat jika kebijakan dalam dan luar negeri suatu negara harus dilakukan secara berimbang dan terukur. Hal ini karena terdapat *linkage* antara kebijakan dalam negeri dan luar negeri yang saling mempengaruhi. *Linkage* tersebut semakin menguat saat ini dengan didorong oleh derasnya arus globalisasi. Giddens berpendapat bahwa globalisasi telah mendorong terjadinya intensifikasi hubungan internasional sehingga fenomena yang terjadi di lingkup global dapat mempengaruhi kawasan regional, nasional, maupun lokal.⁷

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis corak kebijakan luar negeri Indonesia pada

pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo dalam mengelola hubungan internasional guna menciptakan stabilitas kawasan regional. Kemudian, tulisan ini bertujuan memberikan suatu perspektif kebijakan luar negeri Indonesia di masa mendatang dengan memperhitungkan faktor lingkungan strategis global, regional, dan nasional. Penulis berpendapat bahwa kebijakan suatu negara di era *shrinking world* seperti saat ini haruslah bersifat *inward* dan *outward looking*. Secara lebih sederhana, keaktifan dalam forum-forum internasional dapat berkontribusi terhadap kepentingan nasional suatu negara.

Perkembangan Lingkungan Strategis Global & Regional (ASEAN)

Hubungan internasional terus terjalin dan mempunyai beragam corak yang berasal dari kepentingan nasional masing - masing negara. Hubungan internasional tersebut dapat berbentuk kerjasama perdagangan, keamanan, pertahanan, ekonomi, pendidikan, hingga konflik yang semua itu didasari oleh kepentingan nasional. Kepentingan nasional merupakan tujuan, pencapaian, ataupun preferensi kebijakan yang disebarkan melalui pelaksanaan kebijakan luar negeri yang bertujuan akhir untuk keuntungan masyarakat negaranya sendiri.⁸ Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat bermacam-macam bentuk dalam hubungan internasional untuk mencapai kepentingan nasional. Perbedaan ini bisa dilihat dalam pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam, hingga sejarah sebuah negara. Perbedaan dalam sumber daya dan bentuk interaksi hubungan internasional inilah yang terus menggerakkan roda politik internasional. Perpolitikan internasional di era teknologi informasi saat ini tidak hanya menyangkut elit politik semata namun juga semua kalangan dan tidak

5 Ade M Wirasenjaya, "Indonesia's Foreign Policy and Multi-Track Regionalism," *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Volume 8 (2017): 176.

6 Situmorang, "Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Pemerintahan Jokowi-JK", 69.

7 Anthony Giddens, *The Consequence of Modernity*, (Stanford: Stanford University Press, 1990), 64

8 Andrey Heywood, *Global Politics*, (New York: Palgrave Macmillan, 2011), 57

terikat oleh batas-batas negara. Aktor-aktor baru dalam hubungan internasional (*non-state actor*) tersebut saat ini dapat mempengaruhi perpolitikan internasional.

Perpolitikan internasional yang terus bergerak ini juga turut berkontribusi terhadap dinamisitas lingkungan strategis global & regional (ASEAN). Lingkungan strategis global saat ini digerakan oleh dua isu besar yaitu pertahanan dan ekonomi. Negara yang saat ini mendominasi perpolitikan internasional dalam dua isu tersebut adalah Amerika Serikat dan China. Dinamisitas di wilayah ASEAN berawal dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat di era Barrack Obama yaitu "*rebalancing to the Asia-Pacific*" yang dikeluarkan pada tahun 2009. Kebijakan ini bertujuan untuk menyaingi pengaruh China yang terus berkembang pesat di daerah Asia Pasifik. Tentu saja hal ini menimbulkan kemunculan fenomena "*balance of power*" yang mengusik *status quo* yang selama ini dipegang oleh Amerika Serikat. Dengan kebijakan tersebut, Amerika Serikat berusaha untuk mendukung isu-isu internasional yang bertentangan dengan kepentingan nasional China.⁹ Contoh dari hal tersebut adalah dukungan kuat terhadap kemerdekaan Taiwan dari China serta kedekatan hubungan Amerika Serikat dengan Jepang dan Korea Selatan guna mengamankan kepentingan nasionalnya di kawasan pasifik. Di bawah Trump, Amerika Serikat semakin frontal untuk melawan China dengan menerapkan politik "*trade war*" yang membuat struktur ekonomi global turut terpengaruh. Isu Laut China Selatan (LCS) juga turut menjadi perhatian di wilayah regional Asia Tenggara karena terdapat beberapa negara ASEAN yang terlibat secara langsung di dalamnya. Amerika Serikat dan Tiongkok yang berusaha untuk

mensukseskan kepentingan nasionalnya secara langsung maupun tidak langsung telah mempengaruhi kawasan Asia Tenggara.

Perekonomian di Asia Tenggara saat ini didorong oleh perkembangan yang cepat dari China terlepas dari efek positif maupun negatif yang terjadi. Perkembangan perekonomian tentu akan diikuti oleh meningkatnya intensitas hubungan internasional yang berpengaruh dan dipengaruhi oleh perpolitikan internasional yang sedang terjadi. Deputy Kepala Bidang Asia Kementerian Perdagangan China, Yang Weiqun, menyatakan jika nilai perdagangan antara ASEAN dan China selama tahun 2018 tercatat sebesar 587,87 miliar dolar AS. Angka tersebut menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Selain perdagangan, angka investasi antara ASEAN-China mencapai 205,71 miliar dolar AS atau sekitar 22 kali lipat sejak tahun 2004.¹⁰

Peningkatan ekonomi China diberbagai bidang pada kenyataannya telah melewati laju pertumbuhan negara-negara raksasa dalam bidang ekonomi seperti Amerika Serikat, Jepang, dan beberapa negara di Eropa. Walaupun tidak semua negara di Asia Tenggara mendapatkan efek perkembangan ekonomi yang sama, namun hubungan ini telah membangun kedekatan perekonomian China dan Asia Tenggara yang berakibat pada berkurangnya interaksi perekonomian dari pihak lainnya termasuk Amerika Serikat. Tentu hal ini menjadi perhatian serius bagi Amerika Serikat yang sudah lama menancapkan pengaruh di wilayah ini. Negara di kawasan Asia Tenggara yang berada di antara dua kekuatan ekonomi dan politik besar terus berusaha untuk menjaga jarak antara kedua belah pihak untuk memaksimalkan keuntungan hasil dinamika tersebut. Namun, dalam beberapa isu negara-negara ASEAN cenderung

9 J. Canrong, "How America's relationship with China changed under Obama," *World Economic Forum*, 14 Desember 2016, diakses 20 Januari 2019. <https://www.weforum.org/agenda/2016/12/america-china-relationship>

10 Koko, Triarko, "Nilai Perdagangan ASEAN-Cina 2018, Meningkat," *Cendana News*, 14 Mar 2019 - 14:47, diakses 13 April 2019, <https://www.cendananews.com/2019/03/nilai-perdagangan-asean-cina-2018-meningkat.html>

bersikap unilateralis demi mempertahankan kepentingan nasionalnya.¹¹ Hal ini dapat dilihat dari sengketa di Laut China Selatan (LCS). Beberapa negara ASEAN, termasuk Indonesia, mempunyai sikap yang berbeda dan cenderung meninggalkan mekanisme ASEAN yang mengedepankan dialog dan konsensus. Hal ini dapat berakibat melemahnya regionalitas ASEAN dalam menjaga kawasan tersebut tetap stabil dan aman. Pembangunan pangkalan militer China di LCS yang kemudian diikuti oleh Indonesia di wilayah Natuna, dan masuknya intervensi Amerika Serikat secara langsung maupun tidak langsung di LCS menandakan mekanisme ASEAN tidak berjalan. Hal ini mengakibatkan pada terjadinya ketidakpastian dan ketidakstabilan di kawasan regional ASEAN.

Rivalitas Sino-AS di Laut China Selatan (LCS) mendorong kedekatan Vietnam, yang merupakan *claimant state* di isu tersebut, kepada Amerika Serikat. Hal ini cukup menarik mengingat Vietnam merupakan negara komunis yang serupa dengan China. Namun keterbukaan ekonomi Vietnam dan dukungan Amerika Serikat di Laut China Selatan membawa hubungan yang lebih dekat pada kedua negara. Di sisi yang lain, Filipina yang selama bertahun-tahun dekat dengan Amerika Serikat saat ini lebih mendekati kepada China. Hal ini dibuktikan dengan berbagai kesempatan dalam bidang perekonomian yang terbuka lebar terlebih dengan adanya pemberhentian bantuan dana dari Amerika Serikat. Pemberhentian bantuan ini dikarenakan kebijakan Presiden Duterte yang memerangi narkoba dianggap telah melanggar hak asasi manusia (HAM). Tak ketinggalan Indonesia turut mempertahankan kepentingan nasionalnya di tengah turbulensi regional ASEAN. Hal ini dapat dilihat dari

pragmatisme Indonesia yang sedang gencar membangun infrastruktur dan membutuhkan investor dana yang besar. Di bawah Presiden Joko Widodo, kebijakan Indonesia di Laut Cina Selatan telah berubah dari *active player* dalam membangun solusi damai menjadi lebih pragmatis untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Pembangunan pangkalan militer Indonesia di Natuna menunjukkan sikap Indonesia terhadap kedaulatannya, namun di sisi lain Indonesia tidak bisa terlalu antagonis terhadap China. Hal ini karena China merupakan investor potensial bagi proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.¹²

Fakta-fakta di atas menunjukkan pragmatisme negara-negara di ASEAN dalam menjamin kepentingan nasionalnya. Namun, hal tersebut akan berakibat buruk bagi keberlangsungan budaya konsensus ASEAN sebagai mekanisme dalam pengambilan keputusan. Tentu saja pragmatisme negara-negara ASEAN, yang sekaligus meninggalkan “budaya ASEAN” yang mengedepankan konsensus dan dialog, dapat mengurangi kemungkinan terjadinya *collective action* negara-negara ASEAN sehingga dapat berakibat pada instabilitas kawasan. ASEAN yang telah berdiri sejak tahun 1967, saat ini sedang menghadapi ujian besar untuk memilih antara kepentingan nasional atau keberlangsungan kebersamaan regional. Penulis berpendapat kedua hal tersebut harus dilaksanakan secara berimbang dan tidak berat sebelah. Indonesia sebagai *big brother* bagi negara-negara anggota ASEAN saat ini perlu meningkatkan peran dan kepemimpinan di ASEAN guna memperkuat stabilitas keamanan dan kerja sama internasional di wilayah Asia Tenggara. Hal ini penting dikarenakan wilayah Asia Tenggara merupakan wilayah yang rentan terhadap aksi-aksi kejahatan seperti perompakan, *illegal fishing*, dan terorisme.

11 A.M. Murphy, “Great Power Rivalries, Domestic Politics and Southeast Asian Foreign Policy: Exploring the Linkages,” *Asian Security* 13, no. 3 (Agustus 2017): 165-182

12 Aaron L. Connelly, “Indonesia in the South China Sea: Going it alone,” *Lowy Institute for International Policy*, (Desember 2016): 1

Potensi Ancaman di Wilayah Regional ASEAN

Potensi ancaman bagi kawasan Asia Tenggara saat ini mayoritas merupakan ancaman – ancaman berbentuk asimetris yang meliputi *Illegal Unreported Unregulated (IUU) fishing*, terorisme, *piracy*, dan *human rights*. Ancaman dari luar kawasan yang merembet kepada lingkungan strategis kawasan Asia Tenggara yaitu klaim sepihak dari China atas Laut China Selatan yang menyangkut kedaulatan negara Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Indonesia. Bagi Indonesia ancaman-ancaman tersebut dapat mengganggu stabilitas serta perkembangan perekonomian, keamanan, dan perpolitikan regional sehingga dapat mengganggu proses pembangunan di dalam negeri. Berbagai macam potensi ancaman dari dalam dan luar kawasan ini tak kunjung selesai dikarenakan ruang lingkungannya yang bersifat lintas batas negara. Untuk menghadapi berbagai permasalahan lintas batas tersebut penyelesaiannya seharusnya juga melakukan penyelesaian lintas batas negara dengan artian kerja sama antar negara dalam dan luar kawasan Asia Tenggara. Dengan kata lain, kerja sama internasional dan multilateral menjadi sangat penting untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Terjalinya kerja sama internasional antar-negara membutuhkan stabilitas dan ketiadaan konflik atau sengketa. Hal tersebut penting mengingat perkembangan lingkungan strategis telah menimbulkan banyak ancaman terhadap keamanan dan pertahanan negara. Salah satu ancaman nyata bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara saat ini adalah terorisme.

Terorisme menjadi ancaman yang nyata di wilayah regional ASEAN dari dulu hingga saat ini. Hal ini diperparah dengan belum adanya kesepakatan terkait fenomena terorisme, sensitifitas dalam hal kedaulatan, dan ketidakberimbangan kemampuan

pertahanan di antara negara-negara ASEAN dalam menanggulangi terorisme. Hal ini dapat berakibat terjadinya terorisme *spillover* atau penyebaran terorisme ke wilayah negara lain karena ketidakmampuan suatu negara melawan terorisme di wilayahnya sendiri. Terorisme di Asia Tenggara telah menjadi perhatian khusus bagi negara dan masyarakat di kawasan di tahun 2002 pada insiden bom Bali 1. Telah diketahui jika serangan bom ini difasilitasi oleh jaringan terorisme Al Qaeda yang berasal dari luar kawasan Asia Tenggara. Situasi dan kondisi saat ini yang terus berkembang memungkinkan jaringan terorisme menyebarkan pahamnya dengan memanfaatkan teknologi informasi di dunia digital seperti media sosial, internet, dan media *chatting online*. Kemunculan generasi baru terorisme ini disebut oleh Menteri Pertahanan Indonesia Rayamizard Ryacudu dalam kasus Bom Surabaya sebagai terorisme generasi ketiga dikarenakan ide terorisme dengan tujuan tidak lagi hanya meneror agama non-Islam namun agar menciptakan negara dengan hukum Islam seperti jaringan ISIS (*Islamic State*) yang kemudian menyebar ke Eropa dan Asia melalui sosial media, jaringan tidak formal, dan pelatihan dari terorisme asing.¹³

Hal ini sebenarnya juga telah dilontarkan sebelumnya oleh Liow dalam penelitiannya. Ia menjelaskan jika terjadi perubahan pergerakan terorisme akibat terdesaknya ISIS di Timur Tengah sebagai pusat kegiatan terorisme. Terdesaknya ISIS pada akhirnya menjadikan para militan dan kelompok-kelompok teroris di kawasan Asia Tenggara menjadi lebih aktif. Hal ini dapat dilihat dari kasus Marawi yang diusahakan oleh kelompok terorisme sebagai markas untuk operasi teror di kawasan Asia

13 N. Chandran. "Family Terrorism is Southeast Asia's Newest Threat, Defense Officials Warn," *CNBC Asia Pacific News*, 3 Juni 2018, diakses 21 Februari 2019. <https://www.cnbc.com/2018/06/03/family-terrorism-is-southeast-asias-newest-threat-defense-officials-warn.html>

tenggara. Kemudian cara-cara dan profil perekrutan yang biasanya berputar di ruang lingkup para grup radikal mulai berubah kepada mereka yang tidak punya keterlibatan langsung atau disebut sebagai *lone wolf terrorist*, yaitu pelaku teror secara individu tanpa adanya keterikatan dengan grup teroris. Perilaku *lone wolf terrorist* dapat terjadi karena pengaruh yang disebarkan melalui internet dan media sosial.¹⁴ Upaya dalam memerangi kasus terorisme yang bersifat lintas negara di kawasan Asia Tenggara telah dilakukan dengan berbagai upaya. Upaya tersebut seperti kerjasama antar negara seperti *Our Eyes Initiatives* (OEI) yang beranggotakan 6 Negara Asia Tenggara untuk saling bertukar informasi intelijen dan pembentukan *Trilateral Patrol* antara Indonesia-Malaysia-Filipina di wilayah Laut Sulu. Kepentingan nasional yang sama memunculkan inisiatif untuk bekerja sama. Namun kerja sama tersebut memerlukan kesungguhan dan komitmen yang semaksimal mungkin dari negara. Hal ini penting dalam rangka untuk menjalin beragam inisiatif kerjasama di kawasan dalam memerangi terorisme, radikalisme, dan ekstrimisme garis keras.

Selain terorisme, permasalahan yang cukup mendapat perhatian adalah sengketa perbatasan (*territorial disputes*) di Laut China Selatan (LCS) yang menjadi suatu potensi konflik besar. Tentu permasalahan di LCS membutuhkan kesabaran dalam kerja sama dan dialog dengan sekaligus menahan ego nasionalisme masing-masing negara. Terkait sengketa tersebut telah dilakukan berbagai pertemuan bilateral dan multilateral dalam penyelesaiannya yang terbukti sampai sekarang tidak ada eskalasi konflik. Namun, pembangunan pangkalan militer China dan Indonesia di kawasan serta masuknya intervensi Amerika Serikat telah membuat wilayah LCS menjadi sedikit memanas. Ditambah lagi adanya pertemuan antara AS - Australia yang dikatakan oleh

14 J.C. Liow, "Shifting Sands of Terrorism in Southeast Asia," *RSIS Commentary*, 15 Februari 2018, no. 25: 1-5.

Pompeo menghasilkan kesepakatan tidak akan berdiam diri jika terdapat *code of conduct* (COC) yang akan merugikan kepentingan pihak ketiga atau hak dari semua negara dibawah hukum internasional. Hal ini dapat diartikan jika AS dan Australia akan selalu mengupayakan adanya kesepakatan yang menguntungkan mereka.¹⁵ Sengketa perbatasan di wilayah LCS telah berubah menjadi arena pertarungan kepentingan banyak pihak baik negara-negara ASEAN maupun negara-negara di luar ASEAN. Diperlukan suatu kepemimpinan strategis dan komitmen negara-negara ASEAN untuk menjaga kawasan regional tersebut tetap stabil dan aman. Maka sentralitas ASEAN dalam *manage* konflik harus ditegakkan. Hal ini semata-mata guna melindungi kepentingan nasional masing-masing negara ASEAN, yang dalam hal ini termasuk Indonesia. Di era kepemimpinan Joko Widodo, sentralitas Indonesia di ASEAN cenderung mengalami penurunan dibandingkan di era kepemimpinan SBY.

Citra Positif Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Era SBY

Indonesia di bawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menampilkan kebijakan luar negeri yang pro aktif dan *high profile*. Hal ini ditandai dengan safari politik internasional yang dilakukan oleh SBY dalam rangka meningkatkan citra positif Indonesia di kancah internasional. Dengan menggunakan jargon "*thousand friends zero enemy*" SBY ingin menunjukkan posisi penting Indonesia di dunia internasional. Pada tahun-tahun awal pemerintahannya, SBY telah mengunjungi Malaysia dan Singapura yang merupakan tetangga dekat Indonesia. Hal ini penting sebagai tanda "perkenalan" sebagai langkah awal upaya diplomasi di masa yang akan

15 Emanuele Scimia, "South China Sea progress between China and Asean will run into choppy waters with the US", *South China Morning Post*, 29 Februari 2018, diakses 21 Februari 2019, <https://www.scmp.com/comment/insight-opinion/united-states/article/2158455/south-china-sea-progress-between-china-and>

datang. Setelah itu, SBY juga mengunjungi Australia, Selandia Baru, dan Timor Leste.¹⁶ Pada tahun 2009 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah berkata jika “no country perceives Indonesia as an enemy and there is no country which Indonesia considers an enemy. Thus, Indonesia can exercise its foreign policy freely in all directions, having a million friends and zero enemies”.¹⁷ Kata-kata tersebut mengandung makna jika Indonesia merupakan negara yang mendorong kerja sama yang konstruktif dengan negara manapun. Kemudian kalimat tersebut juga memberi pesan kepada dunia bahwa Indonesia merupakan negara yang tidak gemar berkonflik.

Dari fakta di atas dapat disimpulkan jika SBY berusaha untuk memulai hubungan internasional dengan negara-negara ASEAN dan beberapa negara tetangga di sekitar ASEAN. Hal ini sesuai dengan politik luar negeri yang dianut oleh Indonesia sejak Orde Baru yaitu *Concentric Circle Formula*. Konsep ini menjadikan ASEAN terletak pada *concentric circle* yang pertama dan berfungsi sebagai *corner stone* politik luar negeri Indonesia. Dengan kata lain, ASEAN menjadi fokus utama dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Di lingkaran kedua, terdapat negara-negara yang tergabung dalam *Pacific Island Forum* dan *the South West Pacific Dialogue*. Selain itu juga terdapat Konsultasi Tripartite antara Indonesia, Australia, dan Timor Timur. Serta di dalam lingkaran konsentris kedua ini juga terdapat ASEAN + 3 yang meliputi Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan. Sedangkan di dalam lingkaran konsentris ketiga memfokuskan pada kerja sama dengan negara ekonomi

mapan seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa.¹⁸ Dalam isu Laut China Selatan (LCS), Indonesia di bawah SBY mengambil peran sebagai mediator yang selalu menekankan pada penyelesaian masalah secara damai. Ia mengatakan pada forum KTT ke-24 ASEAN di Myanmar bahwa Indonesia secara moral merasa terpanggil untuk berperan aktif dalam penyelesaian sengketa di LCS.¹⁹ Indonesia berperan penting dalam menjaga stabilitas kawasan dan menghindari konflik dalam menangani isu LCS.

Dalam isu terorisme, Indonesia di bawah SBY mencitrakan dirinya sebagai negara Islam terbesar di dunia yang menolak aksi-aksi terorisme yang berlatar belakang agama Islam. Prof. Makarim Wibisono pernah mengatakan jika Indonesia paska peristiwa 9/11 mencoba untuk membuktikan kepada dunia jika semua yang beragama Islam tidak serta merta adalah teroris.²⁰ SBY turut berpartisipasi di banyak forum global dalam bidang anti-terorisme, menjadi ketua *Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Counter Terrorism Task Force*, dan memainkan berbagai peran penting dalam membangun komunikasi dengan negara-negara non-Islam untuk membangun kepercayaan terhadap Islam. SBY menekankan bahwa Islam menentang segala bentuk ekstrimisme. Hal tersebut disampaikan dalam beberapa kesempatan seperti saat bertemu dengan Iyad Ameen Madani, yang merupakan Sekretaris Jenderal OKI (Organisasi Kerja Sama Islam). Pertemuan tersebut dilakukan di sela-sela pertemuan ke-6 *United Nations Alliance*

16 Ratna Shofi Inayati, “Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Politik Luar Negeri Indonesia,” *EJournal Politik LIPI*, 2016, diakses 27 Februari 2019, <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/viewFile/390/227>

17 Rizky Alif Alvia, Ganesh Cintika Putri, & Irfan Ardhani. “Haluan Baru Politik Luar Negeri Indonesia: Perbandingan Diplomasi ‘Middle Power’ Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo”, *Jurnal Hubungan Internasional* 6, no. 2 (Maret 2018): 152

18 Inayati, Ratna Shofia, “Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Politik Luar Negeri Indonesia”, *EJournal Politik LIPI*, 2016, diakses 27 Februari 2019, <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/viewFile/390/227>

19 Rizki Gunawan, “SBY: Indonesia Terdepan Damaikan Konflik Laut China Selatan”, *Liputan6.com*, 12 Mei 2014, 18:03 WIB, diakses 14 April 2019, <https://www.liputan6.com/global/read/2048913/sby-indonesia-terdepan-damaikan-konflik-laut-china-selatan>

20 Ahmad Fuad Fanani, *SBY and the Place of Islam in Indonesian Foreign Policy*, (Adelaide: Flinder University, 2012), 81

of Civilisations (UNAOC) di Bali tahun 2014 silam.²¹

Terpilihnya SBY memberikan harapan baru bagi terciptanya pemerintahan Indonesia yang lebih baik dan berperan dalam kancah perpolitikan internasional. Hal ini diawali oleh SBY dengan menawarkan kerja sama *New Asian-African Strategic Partnership* (NAASP) DI Konferensi Asia-Afrika ke-50 pada April tahun 2005.²² Rizal Sukma mengatakan jika terdapat tiga strategi utama dalam politik luar negeri SBY. Yang pertama adalah fokus Indonesia dalam memprioritaskan pembentukan komunitas regional dengan menekankan pada multilateralisme. Hal ini ditunjukkan dengan keaktifan Indonesia pada forum-forum multilateral seperti ASEAN, APEC, ASEAN + 3, ASEAN Regional Forum (ARF), dan East Asia Summit (EAS). Fokus kedua politik luar negeri Indonesia di bawah SBY adalah turut memberikan perhatian pada hubungan-hubungan bilateral dengan negara *major* dan *regional power* yang meliputi Cina, Korea Selatan, Australia, Jepang, dan Amerika Serikat. Kemudian yang ketiga adalah fokus politik Indonesia dalam upaya untuk aktif dan berkontribusi dalam masalah-masalah global seperti perubahan iklim, keamanan energi, ekonomi, dan pangan.²³

Hal tersebut di atas dilakukan oleh SBY dalam rangka untuk menciptakan citra positif Indonesia di mata dunia. Efek dari penguatan citra positif dapat meningkatkan kepercayaan

negara-negara lain dalam menjalin kerja sama yang konstruktif dengan Indonesia. Selama beberapa tahun Indonesia di bawah SBY telah banyak membangun diplomasi internasional sebagai fokus utama politik luar negeri. Membangun kedekatan dengan negara mitra kunci yang merupakan negara maju maupun negara berkembang diwujudkan dalam bingkai *strategic partnership* ataupun *comprehensive partnership*. Kedua bentuk kemitraan tersebut merupakan suatu cara untuk menyusun struktur hubungan, persetujuan yang didasarkan pada prioritas, serta langkah-langkah yang disusun guna mencapai target yang telah disepakati bersama. Hal ini dapat membuat kerja sama tersebut menjadi lebih terstruktur dan terukur.²⁴ Prinsip “*thousand friends zero enemy*” merupakan suatu proyeksi kekuatan *soft power* Indonesia guna meningkatkan kepercayaan dunia internasional sehingga dapat membangun kerja sama yang konstruktif²⁵ dalam menciptakan stabilitas dan keamanan kawasan.

Pragmatisme Kebijakan Luar Negeri Indonesia di bawah Joko Widodo

Di era Presiden Joko Widodo dapat dikatakan kebijakan luar negeri Indonesia, jika tidak berbanding berbalik, memiliki perbedaan yang signifikan dengan SBY. Banyak kalangan menilai jika Presiden Joko Widodo memiliki pandangan yang *inward looking* atau lebih memfokuskan pada dinamika dalam negeri. Perbedaan latar belakang dengan SBY menjadi salah satu faktor yang menentukan gaya kepemimpinan Joko Widodo. SBY yang berlatar belakang militer dan memiliki pengalaman politik nasional dan internasional berbeda dengan

21 Sandro Gatra, “Presiden SBY dan Sekjen OKI Bahas Perkembangan ISIS dan Boko Haram”, *Kompas.com* - 29/08/2014, 10:22 WIB, diakses 16 April 2019, <https://nasional.kompas.com/read/2014/08/29/10220191/Presiden.SBY.dan.Sekjen.OKI.Bahas.Perkembangan.ISIS.dan.Boko.Haram>

22 Andhik Beni Saputra, “Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2009-2011,” *Repository UNRI*, (2012), diakses 27 Februari 2019, <https://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/1066/PLN%20RI%20Era%20Presiden%20SBY%202009-2011.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

23 Andhik Beni Saputra, “Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2009-2011, 5

24 Andhik Beni Saputra, “Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2009-2011,” 6

25 Tonny Dian Effendi, “Memahami Politik Luar Negeri Indonesia Era Susilo Bambang Yudhoyono secara Komprehensif: Resensi Buku,” *Indonesian Perspective*, Vol. 2, No. 1 (Januari-Juni 2017): 77-81

Joko Widodo yang belum terbiasa dengan forum-forum internasional multilateral. Joko Widodo menerapkan kebijakan *down-to-earth diplomacy* atau diplomasi membumi terhadap kebijakan luar negeri Indonesia. Kebijakan diplomasi membumi dimaksudkan untuk memberikan manfaat langsung bagi rakyat Indonesia. Dalam artian segala bentuk kerja sama difokuskan pada kepentingan nasional terutama dalam bidang ekonomi.²⁶ Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia di bawah Joko Widodo tidak terlalu fokus pada pembentukan citra positif di kancah internasional. Joko Widodo menginginkan hasil yang cepat (*quick result*) dari kerja sama-kerja sama internasional yang dijalankan oleh Indonesia.

Down-to-Earth Diplomacy juga dapat diartikan sebagai kebijakan yang mengutamakan kepentingan domestik atau lebih tepatnya publik Indonesia dengan mengutamakan isu sosial ekonomi yang secara langsung dapat dirasakan masyarakat Indonesia. Dengan berfokus pada isu-isu domestik, bukan berarti Joko Widodo meninggalkan kebijakan luar negerinya. Fokus kebijakan luar negeri Joko Widodo diprioritaskan pada isu-isu ekonomi yang memberikan manfaat secara nyata bagi Indonesia. Sebagai contoh, saat ini Indonesia sedang menggerakkan beberapa perundingan ekonomi yang meliputi *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA), *Free Trade Agreement* (FTA), *Preferential Trade Agreement* (PTA), dan akan memulai perundingan *Bilateral Investment Treaty* (BIT). Di luar isu ekonomi, kebijakan luar negeri Indonesia juga berhasil dalam hal perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Tercatat dalam tiga tahun pemerintahan Joko Widodo pada tahun 2015-2017 telah berhasil menyelesaikan sebanyak 25.620 kasus hukum yang dihadapi oleh WNI. Serta sebanyak 1035 tindak pidana perdagangan orang berhasil untuk diatasi.²⁷

26 Aaron L. Connelly, "Indonesia in the South China Sea: Going it alone," 7.

27 Fetra Tumanggor, "Melihat Politik Luar Negeri

Kebijakan-kebijakan luar negeri tersebut dilakukan dengan tetap berpegang pada prinsip kepentingan nasional yang nyata dan manfaatnya secara langsung terasa.

Terkait dengan isu stabilitas keamanan kawasan seperti terorisme dan Laut China Selatan (LCS), profil politik Joko Widodo tidak sekuat SBY. Dalam isu terorisme misalnya, Joko Widodo tidak terlalu vokal dan aktif dalam forum-forum internasional anti-terorisme. Joko Widodo cenderung mendelegasikan forum-forum tersebut kepada kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan. Kemunculan ISIS dan peningkatan aktivitas kelompok teroris Abu Sayyaf di Filipina turut meningkatkan intensitas pertemuan dan komitmen para pemimpin di kawasan baik bilateral maupun multilateral. Peran tersebut tidak langsung dimainkan oleh Joko Widodo, sebagai contoh kerja sama di tingkat ASEAN yang membentuk "*Our Eyes*", yang merupakan kerja sama pertukaran informasi strategis untuk meningkatkan keamanan kawasan, diprakarsai oleh enam Menteri Pertahanan negara ASEAN, termasuk Indonesia, pada tahun 2018.²⁸ Sedangkan dalam isu Laut China Selatan (LCS), Indonesia di bawah Joko Widodo tidak memainkan peran sentral. Turunnya peran Indonesia di ASEAN dalam isu LCS membuat kondisi kawasan menjadi memanas. Dibangunnya pangkalan militer China di wilayah LCS yang kemudian diikuti oleh Indonesia dengan melakukan hal yang sama di Natuna menandakan mekanisme ASEAN tidak berjalan. Joko Widodo pada kenyataannya lebih menampilkan corak kepemimpinan yang bersifat penguatan domestik (*inward looking*).

Jokowi," *Tagar News*, 25 Oktober 2017, diakses 27 Februari 2019, <https://www.tagar.id/melihat-politik-luar-negeri-jokowi>

28 Kementerian Pertahanan RI, "Enam Menhan ASEAN Tandatangani Perjanjian Kerja Sama "Our Eyes", *ADMM Retreat 2018*, diakses 14 April 2019, <https://www.kemhan.go.id/2018/02/06/enam-menhan-asean-tandatangani-perjanjian-kerja-sama-our-eyes-dalam-admm-retreat-2018.html>

Terdapat empat komponen penanda yang mengkonstruksi kebijakan *inward looking* Joko Widodo. Yang pertama terkait dengan prinsip dan tujuan politik luar negeri Indonesia. Prinsip ini tetap berpegang pada konsep bebas-aktif yang selama ini dianut pada kebijakan luar negeri Indonesia. Implementasi dari prinsip ini dapat dibaca pada visi-misi Joko Widodo-Jusuf Kalla yang menginginkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian gotong royong. Kemudian, Joko Widodo juga memberikan prioritas pada empat elemen yang berfokus pada rakyat yaitu perlindungan WNI/TKI di luar negeri, perlindungan sumber daya alam dan perdagangan, produktivitas perekonomian, dan pertahanan dan keamanan nasional. Komponen kedua sebagai penanda kebijakan *inward looking* Joko Widodo adalah konstelasi politik internasional dan regional. Dalam hal perkembangan lingkungan strategis global dan regional, pemerintah Indonesia cukup merespons dengan baik terutama dalam isu keamanan dan ekonomi.²⁹

Komponen ketiga adalah dinamika politik dalam negeri yang cukup menyita perhatian Presiden Joko Widodo. Dalam fenomena konsolidasi demokrasi paska reformasi, masih terdapat beberapa permasalahan yang menjadi perhatian pemerintah. Permasalahan tersebut meliputi penegakan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi, dan penguatan lembaga-lembaga demokrasi. Penguatan pada elemen-elemen tersebut sejatinya dapat menjadi elemen positif bagi citra Indonesia di mata internasional sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Komponen keempat adalah gaya kepemimpinan Joko Widodo yang didasarkan pada konsep *Rational Action Model* (RAM). RAM mengandaikan jika para pembuat kebijakan dan pengambil keputusan politik,

29 Mangadar Situmorang, "Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Pemerintahan Jokowi-JK," 74.

dalam hal ini Presiden Joko Widodo, harus menguasai permasalahan bangsa baik internal maupun eksternal sebagai modal analisis dalam mengambil kebijakan.³⁰ Latar belakang Presiden Joko Widodo yang belum memiliki cukup pengalaman perpolitikan internasional, sangat mempengaruhi warna kebijakan luar negeri Indonesia yang saat ini cenderung *inward looking*.

Namun demikian, terdapat pula penanda bahwa Indonesia di bawah Joko Widodo juga menampilkan kebijakan yang bersifat *outward looking*. Akan tetapi, corak *outward looking* tersebut berbeda dengan SBY yang mengedepankan citra positif. Indonesia di era Joko Widodo menekankan pada orientasi dan strategi yang berpegang pada kepentingan nasional. Upaya penanggulangan kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia dan keaktifan di forum-forum internasional seperti APEC, G20, dan IORA menjadi penanda *outward looking* Joko Widodo. Namun orientasi kebijakan luar negeri tersebut tetap didasarkan pada pragmatisme "*no profit no deal*". Hamzah menyatakan jika Joko Widodo merupakan pribadi yang berorientasi hasil nyata. Joko Widodo memang tidak selalu nyaman dengan lingkungan internasional di tengah-tengah kekuatan politik global.³¹ Jika di analisis menggunakan *Rational Action Model* (RAM), maka corak kepemimpinan Joko Widodo sangat ditentukan oleh pengalaman pribadinya yang berbeda dengan SBY. Hal inilah yang menjadi corak bagi Joko Widodo dalam menjalankan kebijakan luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinannya.

Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo pada kenyataannya memiliki cukup prestasi di dalam kebijakan luar negerinya. Selain bersemangat menggerakkan forum-forum

30 Mangadar Situmorang, "Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Pemerintahan Jokowi-JK," 76.

31 B.A. Hamzah, "Sinking the Ships: Indonesia's Foreign Policy under Jokowi," *RSIS Commentary*. No. 16, (20 Januari 2015): 2

ekonomi internasional, perlindungan terhadap WNI, dan upaya penanggulangan kapal asing, Indonesia tahun lalu berhasil terpilih kembali untuk keempat kalinya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB untuk periode 2019-2020. Hal tersebut merupakan sebuah prestasi yang sekaligus membawa beban moral kepada bangsa Indonesia. Sebagai anggota tidak tetap DK PBB, Indonesia mendapat legitimasi internasional bahwa memang Indonesia dianggap mampu untuk berkontribusi terhadap upaya menciptakan perdamaian dunia. Namun, dengan beban tersebut maka kebijakan-kebijakan luar negeri Indonesia seharusnya tidak semata-mata bersifat unilateralis, pragmatis, dan mengejar kepentingan nasional semata. Upaya nyata Indonesia sebagai agen dalam perdamaian dunia perlu dituangkan dalam langkah nyata.

Kontekstualisasi Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Tengah Dinamika Regional

Tipe kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo menunjukkan perbedaan yang signifikan. Tentu saja kebijakan luar negeri tersebut telah melalui proses panjang dan perencanaan matang dari masing-masing rezim pemerintahan. Dalam tulisan ini penulis mencoba untuk memberikan analisis guna melihat kelebihan dan kekurangan corak kebijakan yang telah dilakukan oleh SBY dan Joko Widodo. Kemudian, penulis juga memberikan rekomendasi terhadap kebijakan luar negeri Indonesia ke depan dengan melihat kebijakan luar negeri Indonesia di era SBY dan Joko Widodo. Hal ini semata-mata untuk tetap mempertahankan eksistensi Indonesia di kancah internasional dengan tetap mencapai kepentingan nasional.

Telah disampaikan sebelumnya jika corak kebijakan luar negeri SBY sangat mengedepankan citra (*image*) dengan jargon "*thousand friends zero enemy*". Safari politik SBY yang bercorak *high politics* dimaksudkan

untuk membuat Indonesia aktif di kancah perpolitikan internasional. SBY menampilkan kekuatan *soft power* yang didasarkan pada personalitas yang atraktif, budaya, nilai-nilai politik yang menjunjung tinggi moralitas universal.³² Hal ini berujung pada pengakuan dunia internasional kepada Indonesia yang bergerak sejalan dengan nilai-nilai universal. Pola politik luar negeri SBY adalah untuk merangkul banyak pihak dalam kerja sama yang menguntungkan melalui diplomasi internasional. Menurut SBY langkah tersebut dapat memberikan tempat bagi Indonesia di dunia internasional sehingga Indonesia dapat turut serta menentukan dan berkontribusi untuk membuat tatanan global.³³ Namun, kebijakan luar negeri SBY tersebut bukanlah tanpa kritik. Beberapa pihak melayangkan kritik terhadap "safari politik" SBY tersebut sebagai tidak lebih dari sebuah "*ego trip*". SBY dianggap terlalu antusias pada forum-forum multilateral tanpa memberikan efek yang semestinya bagi kepentingan nasional. Bahkan SBY dianggap gagal untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi WNI/TKI Indonesia yang berada di luar negeri.³⁴

Di sisi lain, corak kepemimpinan Joko Widodo dalam kebijakan luar negeri memberikan efek yang nyata pada masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari perbaikan perlindungan bagi WNI/TKI di luar negeri, proyek infrastuktur sebagai pemerataan pembangunan, dan kebijakan Poros Maritim Dunia (PMD) yang berusaha menguatkan sektor maritim Indonesia. Kebijakan-kebijakan tersebut seolah-olah dilaksanakan untuk mengisi gap kekosongan yang ditinggalkan

32 Joseph Nye, *Soft Power: The Means to Success in World Politics* (New York: Public Affairs, 2004): 6

33 Andhik Beni Saputra, "Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2009-2011," *Repository UNRI*, (2012), diakses 27 Februari 2019, <https://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/1066/PLN%20RI%20Era%20Presiden%20SBY%202009-2011.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

34 Aaron L. Connelly, "Indonesia in the South China Sea: Going it alone," 7.

oleh pemerintahan SBY. Pada dasarnya, Joko Widodo mempunyai sikap skeptis pada forum-forum multilateral yang Ia anggap *takes time* dan melelahkan tanpa hasil yang jelas. Hal tersebut membuat Presiden Joko Widodo tidak terlalu menggemari forum-forum multilateral kecuali yang dapat memberikan efek langsung bagi Indonesia.

Connelly menyatakan jika Joko Widodo menekankan pada hasil yang nyata dalam bidang ekonomi dan sikap skeptis terhadap forum-forum multilateral membuat diplomasi luar negeri Indonesia cenderung turun dibandingkan di era SBY. Fakta Menunjukkan jika peran Indonesia di ASEAN turut menurun yang berakibat pada terganggunya proses pembentukan norma-norma ASEAN dan konsensus pada setiap pertemuan di level ASEAN.³⁵ Kepemimpinan Joko Widodo, menurut Rosyidin, cenderung tidak tertarik pada forum regional. Hal ini dapat dilihat dari keengganan Joko Widodo dalam menggunakan mekanisme ASEAN untuk menghadapi sengketa di Laut China Selatan (LCS). Bahkan Indonesia turut “terprovokasi” untuk mendirikan pangkalan militer di Natuna guna menandingi Cina yang sudah melakukan hal serupa sebelumnya. Menurut Rosyidin, kebijakan luar negeri Indonesia di era Joko Widodo bersifat nasionalistis, unilateralis, berorientasi domestik, dan enggan menggunakan mekanisme ASEAN yang melalui proses panjang.³⁶ Pragmatisme Joko Widodo turut disampaikan oleh Rizal Sukma, penasehat kebijakan luar negeri Joko Widodo. Ia menyatakan jika Indonesia akan lebih berfokus kepada pengembangan diplomasi secara bilateral. Hal ini dikarenakan Joko Widodo tidak ingin membuang waktu dalam hubungan diplomatik yang tidak menguntungkan Indonesia.³⁷ Menurunnya peran Indonesia di

kancah regional berakibat pada menurunnya peran ASEAN dalam mengelola konflik dan ancaman keamanan di wilayah regional. Hal ini cenderung dapat menarik kekuatan asing untuk turut campur dan melakukan intervensi baik secara langsung maupun tidak langsung. Kegagalan ASEAN untuk meredam infiltrasi China di Asia Tenggara (klaim sepihak LCS dan pembangunan fasilitas militer) telah membuat Amerika Serikat dan Australia turut bereaksi dengan membangun pangkalan militer di Papua Nugini. Tentu hal ini dapat meningkatkan tensi di kawasan regional yang nantinya juga akan berimplikasi pada instabilitas kawasan.

Fakta tersebut seharusnya juga menjadi pertimbangan Presiden Joko Widodo untuk lebih aktif di forum internasional dan regional dan tidak semata-mata menghitung sekedar untung-rugi. Keaktifan di forum-forum internasional juga menjadi keharusan karena tahun ini Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB. Hal ini membuat Indonesia harus aktif dalam setiap usaha untuk menciptakan perdamaian dunia. Indonesia telah lama menjadi “pemimpin” di ASEAN yang dapat menjaga stabilitas kawasan dan mengelola konflik dengan baik. Peran tersebut saat ini seolah-olah hilang karena sikap pragmatisme dan terlalu fokus pada kepentingan domestik. Penulis berpendapat jika fokus kebijakan suatu pemerintahan seharusnya berfokus *inward* dan *outward looking* sehingga tercipta suatu “*equilibrium*” atau keseimbangan. Di satu sisi Indonesia tetap menjalankan peran dalam forum-forum internasional dengan tidak meninggalkan kepentingan nasional. Terciptanya ASEAN sebagai *zone of peace, freedom and neutrality* (ZOPFAN) dapat meminimalisir intervensi kekuatan asing sehingga kepentingan nasional Indonesia juga tidak terganggu.

35 *Ibid*, 9.

36 Rosyidin, “The Indonesian Quarterly: Reflection on ASEAN at its 50th Anniversary,” 225.

37 P. Prameswaran, “Is Indonesia Turning Away From ASEAN Under Jokowi?”, *The Diplomat*, 2014, Desember

18, diakses 16 April 2019, <https://thediplomat.com/2014/12/is-indonesia-turning-away-from-asean-under-jokowi/>

Kesimpulan

SBY memiliki profil politik yang kuat di kancah internasional yang Ia peroleh dengan aktif di berbagai forum dunia seperti Sidang Umum PBB, pertemuan G-20, dan bahkan memberikan pidato di Universitas Harvard yang merupakan salah satu universitas ternama dunia. Praktis hal tersebut turut mendongkrak citra positif Indonesia di mata dunia. Indonesia di bawah SBY juga tampil sebagai mediator dalam sengketa wilayah di LCS sehingga konflik yang terjadi terbilang sangat minim. Indonesia selalu mendorong penyelesaian sengketa wilayah di LCS dilakukan secara damai. SBY dapat dikatakan berhasil dalam membuat citra positif Indonesia di kancah internasional, namun SBY kurang mampu untuk memberikan hasil nyata bagi Indonesia. Hal ini menyebabkan kritikan dari berbagai pihak bahwa SBY hanya melakukan *ego trip* tanpa hasil yang jelas.

Di sisi lain, Profil politik Joko Widodo di mata internasional dapat dikatakan lemah. Joko Widodo tercatat sudah tiga kali absen dalam Sidang Umum PBB. Hal ini dapat menjadi preseden buruk bagi citra Indonesia di kancah internasional serta melemahkan komitmen Indonesia dalam upaya kontribusinya untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Joko Widodo hanya aktif di forum-forum internasional terutama dalam bidang ekonomi seperti forum IMF-World Bank yang digelar di Bali beberapa waktu yang lalu. Indonesia di bawah Joko Widodo juga gagal mengambil peran sebagai *Big Brother* bagi ASEAN dalam isu LCS. Indonesia justru turut memanaskan suhu politik regional dengan membangun pangkalan militer di Natuna sebagai respons atas dibangunnya pangkalan militer China di wilayah LCS. Meskipun tidak terlalu aktif di forum-forum internasional, kebijakan luar negeri Joko Widodo lebih dirasakan manfaatnya. Hal ini terbukti dengan perbaikan perlindungan WNI di luar

negeri, stabilitas pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur.

Kebijakan luar negeri suatu negara merupakan suatu alat untuk mencapai kepentingan nasional di kancah internasional. Peran aktif suatu negara di forum-forum internasional dapat meningkatkan citra positif sehingga menimbulkan *trust*. Tingginya kepercayaan tersebut dapat memudahkan suatu negara dalam menjalin kerja sama konstruktif yang pada akhirnya dapat mencapai kepentingan nasional. Kerja sama internasional baik yang bersifat bilateral maupun multilateral merupakan pilihan yang paling masuk akal dalam perkembangan dunia yang sangat dinamis. Sebaliknya sikap-sikap pragmatis dan unilateralis dapat membuat suatu negara dikucilkan dalam pergaulan internasional. Perkembangan lingkungan strategis dan beragamnya ancaman membuat suatu negara tidak akan mungkin menghadapinya sendiri. Maka dibutuhkan suatu hubungan yang baik dengan negara-negara lain sebagai modal untuk melakukan kerja sama. Indonesia yang sejak lama merupakan "*pemimpin ASEAN*" sangat dibutuhkan kehadirannya untuk *men-drive* stabilitas keamanan kawasan. Ditambah lagi saat ini Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB yang memberikan tugas bagi Indonesia untuk menjaga stabilitas kawasan dan global. Ujung dari stabilitas kawasan pada akhirnya juga akan bermuara pada kepentingan nasional Indonesia. Hal ini dikarenakan stabilitas keamanan kawasan akan mendorong kerja sama internasional dan pertumbuhan ekonomi.

Penulis berpendapat jika citra positif Indonesia yang dibangun oleh SBY seharusnya dapat diteruskan oleh Joko Widodo. Dengan memanfaatkan citra positif tersebut, Indonesia dapat lebih diuntungkan dalam mencapai kepentingan nasional di kancah internasional. Pembangunan sektor domestik yang menjadi fokus Joko Widodo

akan berjalan lebih maksimal jika stabilitas keamanan kawasan dapat terpelihara seperti sebelumnya. Jika Joko Widodo mampu mempertahankan eksistensinya seperti yang dilakukan oleh SBY di kancah internasional, dan dengan tetap fokus pada penguatan sektor domestik, maka Joko Widodo akan menciptakan suatu keseimbangan (*equilibrium*) dalam kebijakan luar negerinya. Dengan menggabungkan corak kebijakan luar negeri tersebut justru akan menghasilkan suatu kebijakan yang komprehensif, holistik, dan menghasilkan keuntungan jangka panjang. Hal inilah yang akan menjadi kelebihan Joko Widodo dibandingkan dengan SBY. Keaktifan di forum-forum internasional akan menciptakan rasa saling percaya (*trust*). Kepercayaan tersebut akan melahirkan legitimasi dan citra positif pada suatu negara. Kemudian legitimasi dan citra positif tersebut akan memudahkan suatu negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya baik di kancah domestik maupun internasional. Kerja sama internasional juga merupakan cara terbaik dalam merespons ancaman keamanan, pertahanan, dan instabilitas kawasan. Hal ini dikarenakan tidak ada satu negara pun yang mampu menghadapi ancaman tanpa bantuan negara lain. Untuk itu, sikap pragmatis dan unilateralis perlu dihindari oleh negara dalam pergaulan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvia, Rizky Alif., Putri, Ganesh Cintika, & Ardhani, Irfan. "Haluan Baru Politik Luar Negeri Indonesia: Perbandingan Diplomasi 'Middle Power' Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo". *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 6, No. 2 (Oktober 2017-Maret 2018): 152
- Buzan, Barry and Waever, Ole. *Regions and Powers: The structure of International Security*. USA: Cambridge University Press, 2003.
- Rosyidin, Muhammad. "The Indonesian Quarterly: Reflection on ASEAN at its 50th Anniversary." *Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Third Quarter 2017 Vol 45 No. 3* (2017): 225
- Canrong, J. "How America's relationship with China changed under Obama", *World Economic Forum*, 14 Desember 2016. Diakses 20 Januari 2019. <https://www.weforum.org/agenda/2016/12/america-china-relationship>
- Chandran, N. "Family Terrorism is Southeast Asia's Newest Threat, Defense Officials Warn", *CNBC Asia Pacific News*, 3 Juni 2018. Diakses 21 Februari 2019, <https://www.cnn.com/2018/06/03/family-terrorism-is-southeast-asias-newest-threat-defense-officials-warn.html>
- Connelly, Aaron L. "Indonesia in the South China Sea: Going it alone", *Lowy Institute for International Policy*. (December, 2016): 1
- Effendi, Tonny Dian. "Memahami Politik Luar Negeri Indonesia Era Susilo Bambang Yudhoyono secara Komprehensif: Resensi Buku". *Indonesian Perspective* Vol. 2, No. 1 (Januari-Juni 2017): 77-81
- Fanani, A. F. *SBY and the Place of Islam in Indonesian Foreign Policy*. Adelaide: Flinder University, 2012.

- Gatra, Sandro. "Presiden SBY dan Sekjen OKI Bahas Perkembangan ISIS dan Boko Haram", *Kompas.com* - 29/08/2014, 10:22 WIB. Diakses 16 April 2019, <https://nasional.kompas.com/read/2014/08/29/10220191/Presiden.SBY.dan.Sekjen.OKI.Bahas.Perkembangan.ISIS.dan.Boko.Haram>
- Giddens, Anthony. *The Consequence of Modernity*. Stanford: Stanford University Press, 1990.
- Gunawan, Rizki. "SBY: Indonesia Terdepan Damaikan Konflik Laut China Selatan". *Liputan6.com*, 12 Mei 2014, 18:03 WIB. Diakses 14 April 2019, <https://www.liputan6.com/global/read/2048913/sby-indonesia-terdepan-damaikan-konflik-laut-china-selatan>
- Hamzah, B.A. "Sinking the Ships: Indonesia's Foreign Policy under Jokowi". *RSIS Commentary*. No. 016 (20 Januari 2015): 2
- Heywood, Andrey. *Global Politics*. New York: Palgrave Macmillan, 2011
- Inayati, Ratna Shofi. "Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Politik Luar Negeri Indonesia," *EJournal Politik LIPI*, 2016. Diakses 27 Februari 2019, <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/viewFile/390/227>
- Kemhan RI. "Enam Menhan ASEAN Tandatangani Perjanjian Kerja Sama "Our Eyes" dalam ADMM Retreat 2018". *KEMHAN RI*, 2018- Februari 6. Diakses tanggal 14 April 2019, <https://www.kemhan.go.id/2018/02/06/enam-menhan-asean-tandatangani-perjanjian-kerja-sama-our-eyes-dalam-admm-retreat-2018.html>
- Liow, J.C. "Shifting Sands of Terrorism in Southeast Asia," *RSIS Commentary*, 15 Februari 2018, no. 25: 1-5.
- Murphy, A.M. "Great Power Rivalries, Domestic Politics and Southeast Asian Foreign Policy: Exploring the Linkages," *Asian Security* 13, no. 3 (Agustus 2017): 165-182
- Nye, Joseph. *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. New York: Public Affairs, 2004
- Prameswaran, P. "Is Indonesia Turning Away from ASEAN Under Jokowi?," *The Diplomat*, 2014, Desember 18. Diakses 16 April 2019, <https://thediplomat.com/2014/12/is-indonesia-turning-away-from-asean-under-jokowi/>
- Saputra, Andhik Beni. "Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2009-2011," *Repository UNRI*, (2012). Diakses 27 Februari 2019, <https://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/1066/PLN%20RI%20Era%20Presiden%20SBY%202009-2011.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Scimia, Emanuele. "South China Sea progress between China and Asean will run into choppy waters with the US," *South China Morning Post*, 29 Februari 2018. Diakses 21 Februari 2019. <https://www.scmp.com/comment/insight-opinion/united-states/article/2158455/south-china-sea-progress-between-china-and>
- Situmorang, Mangadar. "Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Pemerintahan Jokowi-JK". *Makalah Kegiatan Networking Kantor Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara* (2014): 72
- Triarko, Koko. "Nilai Perdagangan ASEAN-Cina 2018, Meningkat", *Cendana News*, 14 Maret 2019 - 14:47. Diakses 13 April 2019. <https://www.cendananews.com/2019/03/nilai-perdagangan-asean-cina-2018-meningkat.html>

Tumanggor, Fetra. “Melihat Politik Luar Negeri Jokowi”, *Tagar News*, 25 Oktober 2017. Diakses 27 Februari 2019, <https://www.tagar.id/melihat-politik-luar-negeri-jokowi>

Wirasenjaya, Ade M. “Indonesia’s Foreign Policy and Multi-Track Regionalism”. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, volume 8 (2017): 176.